



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VI DPR RI

#### **BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	: 26 (Dua Puluh Enam)
Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
Hari, Tanggal	: Selasa, 14 Februari 2023
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Martin Manurung, S.E, M.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan mengenai Progres Pembinaan KUKM dan Sinkronisasi Basis Data KUKM di Seluruh Indonesia.
Hadir	: 1. 43 Orang dari 57 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Koperasi dan UKM RI, Bapak Teten Masduki; Beserta jajaran.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI pada pukul 10.49 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 14 Februari 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E, M.A.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mendukung percepatan program sinkronisasi basis data Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah bagi Koperasi dan UMKM.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perkoperasian.
3. Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah hukum, seperti meminta Komisi Yudisial melakukan investigasi dugaan pelanggaran kode etik Majelis Hakim dan meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk melakukan eksaminasi terhadap Majelis Hakim yang memberikan putusan vonis bebas pada kasus KSP Indosurya.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk melaporkan secara berkala berkaitan dengan progres kerja SATGAS Koperasi Bermasalah.
5. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk mengusulkan kepada Komite PEN untuk melanjutkan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
6. Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk secara serius mengawal implementasi KUR tanpa agunan.
7. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI untuk segera mendorong Presiden menerbitkan Perpres terkait pendirian pabrik koperasi kelapa sawit rakyat melalui skema pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
8. Komisi VI DPR RI mendukung kerjasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI dan Kementerian BUMN RI dalam penyaluran solar subsidi melalui program Pertashop Solar untuk koperasi nelayan.
9. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.19 WIB.

**MENTERI KOPERASI DAN UKM RI**

Ttd.

**TETEN MASDUKI**

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MARTIN MANURUNG, S.E, M.A  
A-352**